



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Sibengok Rt. 001 Rw. 001 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan Calon Istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 04 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut : --

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXX pada tanggal 13 Juli 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/17/VII/95 tanggal 13 Juli 1995 ;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXX ;-----
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXX umur 14 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD belum bekerja alamat Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan;-----

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXX dengan XXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah menghamilinya dengan usia kehamilannya 6 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya (XXXX) sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;-----
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXX dengan calon istrinya (XXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;-----
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
7. Bahwa Pemohon dan XXXX sudah datang ke rumah keluarga XXXX untuk melamar XXXX, dan XXXX dan keluarganya telah menerima lamaran dari XXXX ;-----
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXX dengan XXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 19 September 1999 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 697/KUA.11.26.04/PW.01/11/2016 tanggal 2 Nopember 2016 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. XXXX No. 474.2/XI/DS/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 104/17/VII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tanggal 13 Juli 1995, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, nomor : 3326071909990001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 25 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nomor : 696/KUA.11.26.04/PW.01/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanggal 02 Nopember

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan

P.4;-----

5. Fotocopy surat penolakan Pernikahan Nomor :
697/KUA.11.26.04/PW.01/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanggal 02 Nopember 2016,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai
dengan P.5;-----

Bahwa, disamping itu, pihak Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **XXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Desa Sokosari Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Karangayar, Kabupaten
Pekalongan, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kec. Kajen dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXX bin XXXX** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXX**;-----
- Bahwa mereka berstatus sebagai perjaka dan perawan;-----
- Bahwa anak Pemohon (**XXXX bin XXXX**) berusia 17 tahun 2 bulan;---
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat karena sudah lama kenal dan berpacaran bahkan **XXXX** sudah hamil 6 bulan;-----
- Bahwa setahu saksi calon isteri anak Pemohon belum bekerja namun sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara calon suami bekerja sebagai Buruh;-----
- Bahwa anak Pemohon (**XXXX bin XXXX**) sudah meminang calon isterinya (**XXXX**);-----

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **XXXX bin XXXX** dengan **XXXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehatinya lagi;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini akan lebih baik, untuk menjaga hal-hal yang tidak inginkan;-----

2. **XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa Kebonangung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa _____ saksi _____ kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXX bin XXXX** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXX bin Cjahuri**;-----
- Bahwa **XXXX bin XXXX** sudah memining **XXXX**;-----
- Bahwa antara **XXXX bin XXXX** dengan **XXXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa antara **XXXX bin XXXX** dengan **XXXX** tidak ada hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa antara **XXXX bin XXXX** dengan **XXXX** tidak ada hubungan semenda;-----
- Bahwa **XXXX** tidak dalam pinangan orang lain selain dari **XXXX bin XXXX**;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehatinya lagi;-----

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Sibengok Rt. 001 Rw. 001 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon (**XXXX bin XXXX**) untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXX** dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sudah memininang, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon (**XXXX bin XXXX**) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan keduanya dengan surat penolakan Pernikahan Nomor : 697/KUA.11.26.04/PW.01/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanggal 02 Nopember 2016 (P.5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 terbukti bahwa Pemohon berumur **17 tahun 2 bulan**, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan akibat hubungan kelamin dengan anak Pemohon, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;-----

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXX**;-----

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum : -----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Undang-undang

Nomor

1

tahun

1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXXX**, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**XXXX bin XXXX**) dengan seorang perempuan bernama **XXXX**;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 November 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asngadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Asngadi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan : | Rp. 70.000,- |
| 4. Biaya redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Kajen

Panitera,

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)